

AKUNTABILITAS APARAT KELURAHAN DAN DESA DALAM MENYALURKAN BANTUAN RASKIN

Kholid Febriysmi

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Accountability in Officials Urban and Rural for Supply Assistance Raskin. The research was motivated by the Program Beras Miskin (Raskin) that cater to the poor. In the implementation of this program by officials dsalurkani villages and rural distribution in the form of data collection and monitoring. The population is rural and village officials who received rice for poor families totaling 100 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive technique. Based on these results, it can be concluded that the level of accountability of officials villages and rural Raskin in delivering assistance to the poor, in the category quite well. It is when seen from the indicators that build accountability as an indicator of transparency in the category is quite transparent.

Abstrak: Akuntabilitas Aparat Kelurahan dan Desa dalam Menyalurkan Bantuan Raskin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program beras miskin (Raskin) yang diperuntukkan untuk keluarga miskin. Dalam pelaksanaannya program ini dsalurkani oleh aparat kelurahan dan desa baik dalam bentuk pendataan penyaluran maupun pengawasan. Populasi dalam penelitian ini adalah aparat kelurahan desa dan keluarga miskin yang mendapat raskin yang berjumlah 100 orang. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas aparat kelurahan dan desa dalam menyalurkan bantuan Raskin kepada warga miskin, dalam kategori cukup baik. Hal ini apabila dilihat dari indikator yang membangun akuntabilitas seperti indikator tingkat transparansi yang masuk dalam kategori cukup transparan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, aparatur pemerintah, kelurahan dan desa, bantuan Raskin

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) setiap unsur pemerintah dituntut mampu memberikan penjelasan tentang tindakan yang dilakukan dan memberikan alasan pemberar mengapa tindakan tersebut dilakukan. Apalagi telah berubahnya paradigma kekuasaan semenjak dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti halnya dengan aparat kelurahan dan desa di Kabupaten Kampar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka mensejahterakan masyarakat selalu membuat kebijakan atau program, seperti program pembangunan yang diperuntukkan kepada masyarakat.

Masyarakat miskin merupakan salah satu masalah bagi pemerintah, dimana kemiskinan merupakan masalah serius yang harus diselesaikan. Namun untuk menyelesaikan masalah tersebut pemerintah banyak menguras tenaga,

pikiran, dan biaya. Dalam rangka meringankan beban masyarakat miskin, pemerintah telah menyalurkan program bantuan beras untuk masyarakat miskin. Program ini dikenal dengan Program Raskin. Berdasarkan SKB Mendagri – Bulog No. 25 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Raskin dimana pemerintah telah menganggarkan subsidi bagi program beras untuk keluarga miskin di Provinsi Riau tahun 2010 sebanyak 26.520 ton yang diperuntukkan pada keluarga miskin menurut pagu sebanyak 176.800 Rumah Tangga Miskin (RTM). Alokasi masing-masing RTM adalah 15 kg/bulan dan harga Rp.1.000/kg di titik distribusi.

Alokasi Raskin untuk Kabupaten Kampar tahun 2010 adalah sebanyak 1.022 RTM dengan bobot 12.775 Kg. Dari jumlah RTM tersebut disebar pada empat kelurahan dan desa, yaitu Kelurahan Langgini sebanyak 310 RTM, Kelurahan Bangkinang 160 RTM, Desa Kumantan 412 RTM, dan Desa Ridan Permai 140 RTM.

Mekanisme alur Raskin yang dilaksanakan yaitu dari Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinci disalurkan ke Bulog Kabupaten selanjutnya didistribusikan ke Kecamatan dan terakhir disalurkan ke masing-masing kelurahan dan desa. Namun berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan, mekanisme alurnya mengalami perubahan. Dari Pemerintah Kabupaten melalui kecamatan lalu didistribusikan ke kelurahan dan desa, dan selanjutnya diberikan kepada masyarakat. Pemerintah tidak memberikan penjelasan tentang tindakan tersebut, siapa saja yang berhak menerima bantuan serta berapa banyak beras yang diterima, dan berapa harga yang seharusnya masyarakat keluarkan untuk memperoleh beras tersebut. Selain itu juga harga beras yang diperuntukkan untuk orang miskin mencapai Rp. 2000,- per kilogramnya. Kemudian masih terdapat masyarakat yang bukan termasuk kategori memperoleh Raskin.

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa menuntut setiap pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan, bersikap transparan dan disampaikan se-cara terbuka kepada publik atas apa yang menjadi sikap, perilaku dan kebijakannya baik yang sedang maupun yang akan dilakukan kepada publik. Selain itu mereka juga harus dapat bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan secara hukum atas sikap, perilaku, dan kebijakannya dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Akuntabilitas sejatinya adalah kunci dari konsep *good governance* yang kini sedang menguat dalam geliat dan situasi dunia yang sedang mengglobal. Akuntabilitas yang menjunjung tinggi nilai *equitable* dan *responsi-venas to people's needs* merupakan resultante dari proses dan prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, efisiensi dan efektifitas) serta globalisasi (demokrasi dan kompetisi).

Dapat ditegaskan bahwa akuntabilitas pada dasarnya lebih berkaitan dengan persoalan tentang aktivitas memberikan pertanggungjawaban atas segenap tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan, serta memberikan respon baik yang berupa koreksi maupun mengambil

tanggung jawab tertentu, atas tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan pemerintah.

Menurut Lilik (2005) bahwa indikator-indikator kunci akuntabilitas yang dimaksud terutama yaitu mencakup enam aspek antara lain: 1) transparansi, 2) kinerja, 3) partisipasi, 4) responsif, 5) kepatuhan hukum 6) ketetapan waktu, dan 7) *Output*.

Kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan dasar hidup keluarga berupa kebutuhan lahiriah dan kebendaan seperti makanan bergizi, pakaian, perumahan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan batiniah seperti keamanan, cinta kasih, kedamaian dan sebagainya.

Kemiskinan ditimbulkan oleh faktor-faktor penyebab dan dimensi-dimensi yang berbeda-beda, tergantung apakah kelompok yang miskin tinggal dipedesaan atau diperkotaan, ataupun mereka hidup dalam struktur keluarga besar, keluarga inti atau seorang diri.

a. Kemiskinan Pedesaan

Sebab-sebab utama kemiskinan pedesaan adalah ketidakmampuan masyarakat menghadapi kondisi-kondisi yang berubah, karena:

- 1) Kondisi kesehatan dan fisik mereka diperlemah oleh kekurangan gizi dan penyakit
- 2) Pengalaman-pengalaman yang di masa lalu menjadi sumber pengetahuan, sudah tidak memadai lagi pada zaman yang ditandai oleh perubahan cepat.
- 3) Mereka tidak mempunyai akses terhadap pengetahuan mengenai metode-metode baru dalam produksi, penyimpanan, pemrosesan dan pemasaran produk-produk mereka;
- 4) Orang-orang dengan sumber pendapatan yang tidak terjamin, tidak mampu membayar biaya tanah, air, tenaga kerja dan input-input lain, dengan demikian tidak mempunyai akses terhadap sumber daya tersebut.

b. Kemiskinan Perkotaan

Problem-problem serupa timbul karena kerangka kerja pemerintah dan hukum yang tidak memadai terjadi juga daerah-daerah perkotaan, misalnya dalam pemberian ijin menetap di atas sejengkal tanah, ijin mendirikan bangunan, atau ijin mendirikan perusahaan atau bengkel.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas aparat kelurahan dan desa dalam menyalurkan bantuan Raskin di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2010.

METODE

Dalam menganalisis akuntabilitas aparat kelurahan atau desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dilihat dari tingkat eksplanasinya, maka dikelompokkan kedalam jenis penelitian kuantitatif pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Populasi masyarakat miskin penerima Raskin yang berjumlah 1.022 KK yang terdapat dalam 2 Kelurahan dan 2 Desa. Jumlah RTM penerima Raskin sebanyak 160 orang dengan sampel 16 orang, Desa Ridan Permai dengan RTM sebanyak 140 orang dengan sampel 14 orang, Kelurahan Langgini dengan RTM sebanyak 310 orang dengan sampel 30 orang, dan Desa Kumantan dengan RTM berjumlah 412 orang dengan sampel 40 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat transparansi yang membahas tentang sampai sejauh mana keterbukaan dan kejelasan proses oleh institusi pemerintah yang memiliki kewajiban melakukan akuntabilitas dalam menyalurkan Raskin kepada warga masyarakat di kelurahan dan desa di Kecamatan Bangkinang tahun 2010, maka dapat diketahui bahwa tanggapan masyarakat mengatakan bahwa tingkat transparansi aparat kelurahan dalam kategori cukup baik dengan skor sebesar 33,75%.

Kinerja yang dicapai terutama yaitu sejauh mana intensitas kesesuaian antara beban dan target yang harus dicapai dengan hasil yang senyatanya dicapai oleh institusi pemerintah, skor yang diperoleh sebesar 26,00%. Hal ini lebih disebabkan aparat kelurahan dalam memfasilitasi bantuan Raskin kepada warga masyarakat sudah disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian warga yang menerima Raskin di-

dominasi oleh warga yang memang benar-benar berhak, yaitu warga miskin dan pelaksanaan bantuan dilaksanakan dengan cukup baik.

Partisipasi membicarakan tentang sampai sejauh mana intensitas keterlibatan dari intitusi yang memiliki hak dan kewenangan atau kepentingan dengan akuntabilitas intitusi pemerintah, melakukan penilaian, mengajukan tuntutan, serta mempengaruhi pengambilan keputusan atas rencana kebijakan, kebijakan resmi dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan itu sendiri. Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh skor partisipasi berbagai pihak sebesar 36,00% dengan kriteria kurang baik. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi Ketua RT dan RW masih kurang baik dalam mendukung penyaluran Raskin, sehingga masih terdapat RTM di RT dan RW tersebut yang belum mendapatkan raskin.

Daya tanggap membicarakan tentang sejauh mana intensitas tindakan yang diambil oleh institusi pemerintah untuk menanggapi dan menindaklanjuti penilaian maupun tuntutan yang diajukan oleh institusi lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk menindaklanjuti akuntabilitas institusi pemerintah, atau institusi lain yang berkepentingan dengan akuntabilitas institusi pemerintah tersebut, skor yang diperoleh sebesar 32,00% dengan kriteria cukup baik. Ini menunjukkan bahwa daya tanggap aparat kelurahan dan desa dalam menangani berbagai keluhan warga dan tingkat kepuasan warga dalam penyaluran Raskin ini dalam kategori cukup.

Kepatuhan hukum, terutama yaitu tentang sejauh mana intensitas tingkat kesesuaian atas proses dan substansi rencana, kebijakan formal yang diambil dan pelaksanaan yang dilakukan oleh institusi pemerintah itu sesuai dengan serangkaian aturan formal yang berlaku dan harus dipatuhi oleh institusi pemerintah tersebut, skor yang diperoleh sebesar 30% dengan kriteria cukup baik. Ini berarti bahwa kepatuhan terhadap hukum atau ketentuan yang berlaku dalam menyalurkan bantuan Raskin sudah baik. Kondisi ini lebih disebabkan karena warga yang menerima raskin telah diberikan pengertian tentang selisih harga dan bobot Raskin yang diterima.

Ketepatan waktu yang diukur sejauh mana intensitas ketepatan waktu pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan, tanggapan warga masyarakat yang menerima Raskin sudah baik dengan persentase sebesar 35%. Hal ini karena waktu pelaksanaan Raskin sudah sesuai dengan kebijakan Bulog. Artinya ketika Raskin disalurkan ke kelurahan dan desa, aparat kelurahan dan desa langsung mendistribusikannya kepada warga.

Output atau keluaran, dapat diterjemahkan sebagai hasil dari suatu proses, atau intensitas seberapa besar proses itu sendiri memberikan manfaat bagi sasaran objek dari proses tersebut, dalam hal ini tingkat pemenuhan kebutuhan pokok, harga beras yang lebih terjangkau, kualitas beras yang baik telah terpenuhi dengan baik dengan adanya Raskin, dengan persentase sebesar 30,30% dengan kriteria sudah cukup baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan adanya Raskin warga sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok.

Dalam hal akuntabilitas aparat kelurahan dalam menyalurkan Raskin kepada warga miskin, maka dapat diketahui tingkat akuntabilitas ini adalah dalam kategori cukup baik yang dapat dilihat dari skor yang diperoleh sebesar 29,78%. Ini berarti bahwa tingkat akuntabilitas aparat kelurahan dan desa dalam menyalurkan bantuan Raskin dalam kategori baik. Dimana aparat dalam menyalurkan bantuan Raskin oleh aparat kelurahan dan desa sudah diterima warga dengan baik, kemudian hasil yang dicapai juga dianggap sudah baik.

Aparat kelurahan dan desa juga dinilai patuh terhadap hukum. Walaupun dalam menyalurkan Raskin keramahan aparatur masih dirasa kurang, hal ini disebabkan keterbatasan yang dimiliki aparat dalam memberikan menyalurkan Raskin kepada warga kelurahan dan desa yang relatif banyak sedangkan waktu penyaluran yang sangat terbatas. Kemudian dalam menentukan warga miskin masih belum melibatkan RT dan RW sehingga data yang ditetapkan dianggap tidak akurat dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu juga dari daya tanggap aparat terhadap berbagai kelurahan warga juga masih dirasakan cukup baik dimana walaupun jumlah

warga yang memperoleh bantuan dirasakan kurang sesuai namun aparat kelurahan membuat kebijakan untuk membagi rata beras yang diterimanya dan harga beras yang ditambah Rp. 200,- untuk biaya angkut beras. Hal inipun telah dikonfirmasi kepada warga melalui tokoh masyarakat dan Ketua RT dan RW di masing-masing.

SIMPULAN

Tingkat akuntabilitas aparat kelurahan dan desa di Kecamatan Bangkinang dalam menyalurkan Raskin berada pada kategori cukup baik. Namun kedisiplinan dan keramahan para aparat serta tingkat partisipasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam kategori kurang baik. Hal ini karena aparat kelurahan dan desa belum melibatkan RT dan RW dalam pendataan RTM dan penyebaran informasi mengenai Raskin. Tingkat daya tanggap aparat kelurahan juga dalam kategori cukup tanggap. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon terhadap keluhan warga, baik tentang harga, jumlah yang diterima maupun dalam menindaklanjuti keluhan tersebut serta tingkat kepuasan masyarakat juga sudah cukup tinggi sehubungan dengan daya tanggap aparat kelurahan dan desa yang relatif cepat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ekowanti, Lilik. 2005. *Isu Strategik Riset dan Aksi Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah*. Surabaya.
- Irawan, 2000, *Ekonomika Pembangunan*, BPFE, Yogyakarta.
- Romzek, Barbara S. Dan Dubnicks, Melvin J. 1987. *Accountability in the Public Sector; Lessons from the Challenger Tragedy*, Public Administration Review, May/June, 1987.
- Salim, 2004, *Kemiskinan Perkotaan*, Alfabeta, Bandung
- Schacter, M. 2004. *When Accountability Fails: A Framework For Diagnosis and Action*. Working Paper, Institute on Governance, Canada.
- Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia: Bandung.